

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pematang

Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang belum optimal dilihat dari unsur kapasitas kelembagaan seperti keterampilan organisasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur.

1) Keterampilan Organisasi

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap pengelolaan sampah belum mencapai target baik pada pengurangan maupun penanganan sampah seperti yang tercantum pada Kebijakan dan Strategi Daerah. Keterampilan organisasi cukup baik dilihat dari perencanaan dan pertanggungjawaban dimana perencanaan dilakukan dengan penyusunan program Pengelolaan Sampah dalam Rencana Kerja maupun Rencana Strategis. Setiap pegawai juga diwajibkan untuk memberi laporan terkait hasil kerja agar bisa dilakukan pemantauan juga apakah pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan baik atau belum.

2) Sumber Daya Manusia

Kapasitas belum optimal jika dilihat dari sumber daya manusia dimana jumlah tenaga pengelola sampah yang masih terbatas, penempatan fungsi sudah diupayakan sesuai kompetensi namun belum sepenuhnya optimal seperti pegawai TPA yang tidak begitu memahami dengan detail terkait pengelolaan lingkungan. Selain itu upaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan

kemampuan dan kapasitas pegawai juga masih sangat minim sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan belum optimal.

3) Infrastruktur

Dilihat dari sarana prasarana hingga teknologi pengelolaan sampah belum cukup baik. Sarana prasarana pengelolaan sampah masih terbatas bahkan dengan kondisi rusak ringan hingga berat tetapi masih bisa dipakai dan perlu terus dilakukan perawatan. Pengelolaan sampah juga sudah berupaya menerapkan teknologi yang bisa mengubah sampah menjadi bernilai melalui *drop box* sebagai upaya mendukung lingkungan yang ramah dan lestari serta incinerator sebagai alat untuk memusnahkan sampah dengan metode pembakaran.

4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pematang

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang didalamnya terdapat dua faktor yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah antara lain, *pertama* yaitu pemimpin yang telah berperan sebagai pendorong dan mengarahkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah dengan terobosan dan inovasinya, pemimpin juga memberi kesempatan berpendapat bagi pegawainya. *Kedua* yaitu peraturan pengelolaan sampah yang sudah berisi hal umum hingga teknis yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan dan cara kelembagaan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang optimal. *Ketiga* yaitu terjalinnya iklim dan budaya kerja yang baik antar pegawai dengan pegawai maupun dengan pemimpin sehingga pencapaian tujuan pengelolaan sampah akan lebih mudah.

Faktor penghambat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pematang Jaya adalah kurangnya keterlibatan semua aktor, yang bisa mendorong keberhasilan pengelolaan sampah adalah seluruh aktor yang aktif terlibat, jika hanya beberapa saja yang terlibat dan peran lain tidak dilaksanakan maka untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal juga sulit.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam mendorong kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, yaitu :

1. Dalam mengatasi kinerja yang belum mencapai target pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan edukasi, pelatihan, dan kampanye 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) kepada masyarakat baik secara langsung maupun memanfaatkan media sosial sebagai upaya mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA dari sumber sampah atau rumah tangga.
2. Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan rekrutmen secara terbuka dengan menetapkan standar seleksi yang ketat untuk memperoleh petugas pengelolaan sampah yang kompeten utamanya pada tenaga bongkar muat dan pengelola TPA. Memanfaatkan tenaga kerja yang ada melalui penyusunan jadwal kerja secara efisien dan fleksibel.
3. Dalam mengatasi minimnya upaya pendidikan dan pelatihan petugas pengelola sampah. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan analisis kebutuhan pelatihan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan apa yang

perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkala misalnya setiap tiga bulan sekali. Dalam hal ini perlu dilakukan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta pelatihan keterampilan spesifik seperti pemilahan sampah, cara pengoperasian alat berat, hingga manajemen limbah bagi petugas pengelola sampah baik tenaga kebersihan hingga pengelola TPA.

4. Dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana dengan kondisinya yang kurang baik. Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap sarana prasarana yang ada untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan perbaikan atau dengan sistem monitoring berbasis teknologi juga dapat diterapkan dalam memantau kondisi sarana prasarana secara *real time* dan mendapat laporan kerusakan secara lebih cepat.
5. Dalam mengatasi kurangnya keterlibatan aktif dari semua aktor pengelola sampah. Dinas Lingkungan Hidup dapat membuat regulasi turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang mengharuskan semua pihak termasuk rumah tangga dan industri untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Melakukan kampanye pentingnya pengelolaan sampah secara intensif melalui media massa, sosial media, hingga komunitas dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat.